

SKRIPSI

**ANALISIS JUMLAH NASABAH, PENDAPATAN SEWA
MODAL DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP
PENYALURAN PEMBIAYAAN *RAHN* DI PT PEGADAIAN
(PERSERO) INDONESIA TAHUN 2003-2016**



Disusun Oleh:

**Sa'adatul Hijriah
140602114**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

**ANALISIS JUMLAH NASABAH, PENDAPATAN SEWA
MODAL DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP
PENYALURAN PEMBIAYAAN *RAHN* DI PT PEGADAIAN
(PERSERO) INDONESIA TAHUN 2003-2016**



Disusun Oleh:

**Sa'adatul Hijriah
140602114**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sa'adatul Hijriah
NIM : 140602114
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

BandaAceh, 10 Juli 2018

 : Menyatakan
Sa'adatul Hijriah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal, dan Tingkat
Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* di PT Pegadaian
(Persero) Indonesia Tahun 2003-2016.**

Disusun Oleh:

Sa'adatul Hijriah

NIM: 140602114

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag.

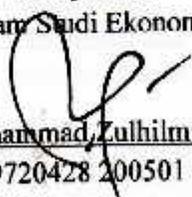
NIP: 19710317 200801 2 007

Pembimbing II,

Jalaluddin, ST., MA.

NIDN: 2030126502

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Muhammad Zulhildi, MA.

NIP: 19720428 200501 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Sa'adatul Hijriah

NIM: 140602114

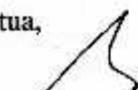
Dengan Judul:

**Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal, dan Tingkat
Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn di PT Pegadaian
(Persero) Indonesia Tahun 2003-2016.**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juli 2018
26 Syawwal 1349H

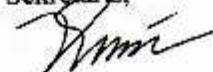
Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Nilam Sari, M.Ag

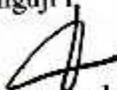
NIP: 19710317 200801 2 007

Sekretaris,


Jalaluddin, ST., MA

NIDN: 2030126502

Penguji I,


Muhammad Arifin, Ph.D

NIP: 19741015 200604 1 002

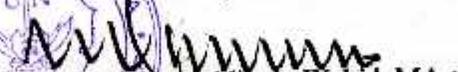
Penguji II,


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

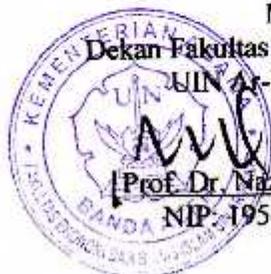
NIP: 19720428 200501 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 1956/231 198703 1 031





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sa'adatul Hijriah
NIM : 140602114
Fakultas/Program Studi : FEBI/Ekonomi Syariah
E-mail : Saadatul22z@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

(*tulis jenis karya ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Di PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Juli 2018

Penulis

Sa'adatul Hijriah

Pembimbing I

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

Mengetahui

Pembimbing II

Jalaluddin, S.T., M.A
NIDN: 2030126502

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn di PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016”*. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Jalaluddin, ST., MA. selaku dosen pembimbing II yang saya hormati dan saya banggakan, yang telah bersedia menjadi orang tua kedua dalam membimbing saya dengan sangat sabar, meluangkan waktu serta

memberi arahan dan motivasi dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Khairul Amri SE., M.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi yang terbaik buat saya, dan seluruh dosen Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada saya.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syammaun Husen (alm) Ibunda Burhanah yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini.
7. Kakak-kakak, Abang-abang dan Adik yang memberikan semangat serta motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna untuk memperoleh gelar sarjana dan ilmu yang diperoleh berguna bagi seluruh umat di muka bumi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik Bu Winny, Iin, Nadel, Uneng, Kak Anis, Kak Intan, Kakak Kembar, Lisa, Suri, Kausar, Fadhil, Jarjis, Mustaqim, Syahrul, Ghufuran, Rama, Rahmi, Ita, Khusna, Maryati, Redha, Asatidz/ah TPA Al Hilal, Ma'had Daaruttahfidz Al Ikhlas Squad, teman-teman GenBI, QAF, *Islamic Economics Community* Al Mahira dan sahabat-sahabat lainnya yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Darussalam, 10 Juli 2018

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sa'adatul Hijriah', written in a cursive style.

Sa'adatul Hijriah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* ()hidup

Ta *marbutah* ()yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-af l/ rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةُ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Pegadaian Syariah	13
2.1.1 Pengertian Pegadaian Syariah	13
2.1.2 Ketentuan Hukum Pegadaian Syariah	14
2.1.3 Operasional pegadaian Syariah	17
2.2 Rahn	19
2.2.1 Pengertian Rahn	19
2.2.2 Landasan Hukum Rahn	20
2.2.3 Rukun Rahn	23
2.2.4 Syarat Rahn	24
2.2.5 Praktik	24
2.3 Pembiayaan	29

2.3.1	Pengertian Pembiayaan	29
2.3.2	Jenis Pembiayaan	30
2.3.3	Fungsi Pembiayaan	33
2.3.4	Pembiayaan Rahn	34
2.4	Nasabah	35
2.4.1	Pengertian Nasabah	35
2.5	Pendapatan Sewa Modal	36
2.6	Inflasi	38
2.6.1	Pengertian Inflasi	38
2.6.2	Teori Inflasi	39
2.6.3	Penyebab Inflasi	44
2.6.4	Dampak Inflasi	45
2.6.5	Indikator Inflasi	48
2.7	Penelitian Terdahulu	48
2.8	Keterkaitan Variabel	54
2.8.1	Keterkaitan Antara Jumlah Nasabah dengan Pembiayaan Rahn	54
2.8.2	Keterkaitan Antara Pendapatan Sewa Modal dengan Pembiayaan Rahn	55
2.8.3	Keterkaitan Antara Tingkat Inflasi dengan Pembiayaan Rahn	57
2.9	Kerangka Pemikiran	58
2.10	Hipotesis	59

BAB III	METODELOGI PENELITIAN	61
3.1	Jenis Penelitian	61
3.2	Jenis Data dan Sumber Data	61
3.3	Teknik Pengumpulan Data	42
3.4	Operasional Variabel	63
3.4.1	Variabel Independen (Y)	63
3.4.2	Variabel Independen (X)	64
3.5	Metode Analisa Data	65
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	65
3.5.2	Analisis Regresi Linier Berganda	68
3.6	Pengujian Hipotesis	69
3.6.1	Uji Parsial (Uji t)	69

3.6.2 Uji Simultan (Uji F)	70
3.6.3 Koefesien Determinasi (R^2)	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Profil Pegadaian Syariah	72
4.2 Analisis Deskriptif	75
4.2.1 Pembiayaan Rahn dan Jumlah Nasabah	75
4.2.2 Pembiayaan Rahn dan Pendapatan Sewa Modal	77
4.2.3 Pembiayaan Rahn dan Tingkat Inflasi	79
4.3 Uji Asumsi Klasik	82
4.3.1 Uji Normalitas	82
4.3.2 Uji Multikolinearitas	83
4.3.3 Uji Autokolerasi	84
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	85
4.4 Uji Koefesien Regresi Linier Berganda	86
4.5 Uji Parsial (Uji t)	87
4.6 Uji Simultan (Uji F)	90
4.7 Koefisien Determinasi (R^2)	91
4.8 Pembahasan dan Hasil Penelitian	91
4.8.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1	91
4.8.2 Hasil Pengujian Hipotesis 1	92
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103
BIODATA	108

ABSTRAK

Nama : Sa'adatul Hijriah
Nim : 140602114
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* di PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016
Tanggal Sidang : 10 Juli 2018
Tebal Skripsi : 121 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Jalaluddin, S.T., M.A

Pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang terus berupaya meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah nasabah, pendapatan sewa modal dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian (Persero) Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan pengujian asumsi klasik. Data yang digunakan adalah data time series yaitu periode 2003-2016. Berdasarkan hasil analisis secara parsial jumlah nasabah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *rahn* dengan probabilitas t-statistik sebesar 0,774. Pendapatan sewa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *rahn* dengan probabilitas t-statistik sebesar 0,000 dan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *rahn* probabilitas t-statistik sebesar 0,829. Secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap pembiayaan *rahn* PT Pegadaian (Persero) Indonesia dengan koefisien determinasi ($adj R^2$) 99,8%. Sesuai dengan *tag line* pegadaian yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah maka pegadaian perlu menjaga kestabilan kinerja perusahaan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.

Kata kunci: Pembiayaan *rahn*, jumlah nasabah, pendapatan sewa modal, tingkat inflasi, regresi linier berganda.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Rahn, Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal dan Tingkat Inflasi pada PT Pegadaian Indonesia 2003-2016 (Miliar Rupiah)	6
Tabel 2.1 Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi	27
Tabel 2.2 Tarif Jasa Simpan dan Pemeliharaan	28
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Variabel Penelitian	63
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas	83
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	84
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokolerasi	85
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas	86
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	87
Tabel 4.6 Hasil Uji t	88
Tabel 4.7 Hasil Uji Simutan	90
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2)	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	58
Gambar 4.1 Pembiayaan Rahn (Miliar Rupiah) dan Jumlah Nasabah (Orang) Pegadaian Syariah Indonesia Tahun 2003-2016	76
Gambar 4.2 Pembiayaan Rahn (Miliar Rupiah) dan Pendapatan Sewa Modal (Miliar Rupiah) Pegadaian Syariah Indonesia Tahun 2003-2016	78
Gambar 4.3 Pembiayaan Rahn (Miliar Rupiah) dan Tingkat Inflasi (Persen) Pegadaian Syariah Indonesia Tahun 2003-2016	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Tabel Laporan Keuangan Tahunan PT Pegadaian (Persero) di Indonesia Tahun 2003-2016	103
Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas	104
Lampiran 2 Hasil Uji Multikolinieritas	104
Lampiran 3 Hasil Uji Autokolerasi	105
Lampiran 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	105
Lampiran 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	106
Lampiran 4 Hasil Uji Simultan	107
Lampiran 5 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2)	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian global tahun 2016 mengalami penurunan. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju serta terus berlanjutnya tren penurunan harga komoditas dunia membuat pertumbuhan ekonomi global kembali mengalami perlambatan. Tahun 2016 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 4,88%. Konsumsi rumah tangga yang kuat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2016 pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,01%.

Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian ini didukung oleh relatif terkendalinya harga-harga barang yang terefleksi oleh tingkat inflasi yang terkendali selama tahun 2016 yaitu 3,02%. Tingkat inflasi tersebut merupakan yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Inflasi yang terkendali ini tidak terlepas dari peran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi, serta semakin baiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Pegadaian, 2016).

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang beragam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bergerak dan bekerja yang dibenarkan sesuai syariah. Hasil jerih payah ataupun pendapatan yang diperoleh manusia dari usahanya sangat beragam. Karena manusia akan mendapatkan sesuai yang dia usahakan. Kadang kala kebutuhan manusia tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh sehingga mendorong manusia untuk mencari alternatif yang layak dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Orang-orang yang diuntungkan mereka memperoleh pekerjaan yang layak sehingga pemenuhan kebutuhannya tercukupi. Akan tetapi ada juga masyarakat yang harus melakukan pinjaman kepada tetangga untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar sewa rumah, uang kuliah, uang saku, uang untuk beli buku dan keperluan lainnya terpaksa harus berhutang kepada teman-temannya. Dalam utang piutang dengan individu tidaklah mudah, karena pemberi hutang perlu melihat risiko yang akan terjadi disaat orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Maka dalam berhutang ada barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang kepada pemberi hutang atas hutangnya itu sehingga barang tersebut (agunan) dapat dijual ketika hutang tidak dapat dilunasi inilah yang disebut dengan gadai.

Dalam Islam gadai disebut juga dengan rahn, dalam melakukan rahn harus ada orang yang menggadaikan

barang(*rahin*), pemberi gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*), hutang (*marhun*), serta ijab dan qabul (*sighat*) Barang yang dijadikan agunan harus memiliki nilai yang sama atau lebih dengan nilai hutang. Pada saat penjualan barang agunan, uang yang lebih harus di kembalikan kepada *rahin*. Namun praktiknya dalam masyarakat tidak demikian, bahkan lebih parah lagi *marhun bih* di manfaatkan oleh *murtahin*. Padahal dalam Islam menurut Mazhab Hanafiah *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Ketika *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin* akan berdampak pada kesenjangan pola hidup. Orang kaya akan semakin kaya dan begitu pula sebaliknya sehingga menimbulkan kekacauan dalam perekonomian karena *rahin* tidak punya cukup modal untuk melakukan transaksi.

Lembaga keuangan yang muncul sekarang ini sangat banyak guna mendukung keberlangsungan pertumbuhan perekonomian dengan memberdayakan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan memiliki peran penting sebagai mediator antara orang yang membutuhkan dana dengan orang yang kekurangan dana. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang sekarang ini adalah PT Pegadaian. Usaha gadai telah dikenal masyarakat secara luas sejak dahulu. Usaha gadai juga telah menjadi solusi pendanaan, memutus ijon, terhindar dari lingkaran rentenir dan pinjaman yang tidak wajar. Pinjaman yang diberikan di pegadaian bisa berskala kecil, cepat, aman dan tidak rumit. Usaha gadai terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik.

Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan terkait industri gadai di Indonesia, melalui POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No 31/ POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2016. Secara umum POJK tersebut mengatur tentang bentuk badan hukum, permodalan, persyaratan dan prosedur perizinan usaha. Selain itu diatur juga soal kegiatan usaha yang diperkenankan serta penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Ini merupakan babak baru dalam perkembangan industri gadai di Indonesia. Dengan adanya POJK tersebut, diharapkan industri gadai dapat turut serta memberikan sumbangsih terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hadirnya perusahaan gadai yang lebih tertata dan sehat secara kinerja diyakini dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pinjaman di luar perbankan (Pegadaian, 2016).

Pada Tahun 2002 keluar Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang disebutkan beberapa hal tentang rahn. Hal ini dapat kita lihat pada Lembaga Keuangan Syariah PT Pegadaian perlu merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produk yang dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Gadai syariah merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai melalui skim dengan jaminan berupa barang bergerak untuk jangka waktu 4 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu atau diperpanjang saat pinjaman telah

jatuh tempo. Nasabah dikenakan biaya sewa modal (*ujrah*) yang dihitung dari nilai taksiran barang jaminan yang disimpan di perusahaan sebagai rekening. Di segmen bisnis gadai syariah, pegadaian memiliki beberapa produk pembiayaan yaitu *rahn*, *arrum*, *amanah*. *rahn* merupakan pembiayaan dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif sesuai dengan prinsip syariah (www.Pegadaian.co.id).

Pegadaian syariah akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal dalam menentukan jumlah penyaluran pembiayaan gadai syariah. Faktor internal yang dimaksud yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola dengan baik seperti manajemen asset perusahaan, faktor 5C (*character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*) manajemen kredit. Termasuk di dalam faktor internal yaitu perkembangan pendapatan sewa modal. (Febrian, 2015). Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah penyaluran pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu jumlah nasabah, pendapatan sewa modal, serta tingkat inflasi. Dengan demikian pegadaian syariah dapat lebih efektif dalam melakukan pembiayaan untuk masyarakat yang butuh dana cepat, mudah dan aman.

Rahn merupakan produk pertama yang ada pada Pegadaian Syariah yang dikeluarkan pada tahun 2003. Sejak pembiayaan rahn lahir terus mengalami peningkatan tiap tahunnya hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat sangat butuh terhadap pembiayaan jenis gadai yang bebas dari praktik riba. Dalam penelitian ini dilihat dari tahun 2003 sejak produk rahn lahir sampai dengan tahun 2016. Berikut adalah tabel penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah di Indonesia dalam waktu 5 tahun awal yaitu tahun 2003-2007:

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Rahn, Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal dan Tingkat Inflasi di PT Pegadaian (Persero) Indonesia 2003-2007

Tahun	Pembiayaan Rahn (Miliar Rupiah)	Nasabah (Orang)	Pendapatan Sewa Modal (Miliar Rupiah)	Inflasi (Persen)
2003	19.891	13.526	405	5,16
2004	174.595	121.379	6.815	6,4
2005	308.709	226.424	15.031	17,11
2006	591.087	312.577	33.363	6,6
2007	964.056	446.984	60.467	6,59

Sumber : *Annual Report* Pegadaian dan Bank Indonesia

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat perkembangan penyaluran pembiayaan rahn di pegadaian Indonesia dari tahun 2003-2007 pinjaman yang diberikan bisnis inti syariah (*rahn*) selama 5 (lima) tahun mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sebesar 19.891

miliar rupiah pada tahun 2003 meningkat menjadi 964.056 miliar rupiah pada tahun 2007. Jumlah nasabah yang dapat diraih juga mengalami peningkatan yaitu dari 13.526 nasabah tahun 2003 menjadi 446.984 nasabah tahun 2007. Refleksi dari peningkatan penyaluran pembiayaan rahn, jumlah nasabah, menghasilkan pendapatan usaha sewa modal (*ujrah*) yang jumlahnya meningkat setiap tahun yaitu dari 405 miliar rupiah tahun 2003 menjadi 60.467 miliar rupiah tahun 2007. Pada tahun 2005 terjadi krisis global sehingga menyebabkan inflasi di Indonesia mencapai 17,11 persen, pendapatan sewa modal yang diperoleh dari *rahn* 15.031 miliar rupiah serta PT Pegadaian mampu memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 308.709 miliar rupiah.

Jumlah nasabah mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan rahn. Semakin banyak nasabah rahn maka besar pula pembiayaan yang disalurkan. Pada tahap selanjutnya dengan banyak nasabah maka akan banyak pula barang-barang agunan sehingga meningkatkan pendapatan sewa modal. Pendapatan sewa modal atau yang disebut juga *ujrah*. Perum Pegadaian selain melayani kepentingan umum, juga bertujuan untuk mendapatkan laba. Untuk itu Perum Pegadaian terus berupaya meningkatkan fasilitas yang diberikan. Hal ini guna meningkatkan pendapatan yang berasal dari biaya administrasi, biaya pemeliharaan, uang kelebihan kadaluwarsa, jasa taksiran, jasa titipan, dan lain-lain. Oleh karena itu, semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan

kepada nasabahnya (Sinarti, 2012). Inflasi mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan. Pengaruh inflasi ini melalui tingkat bunga nominal, dikarenakan tingkat bunga riil yang terbentuk dari tingkat bunga nominal dikurangi inflasi. Apabila tingkat inflasi tinggi maka tingkat bunga riil akan menurun, ini akan mengakibatkan naiknya jumlah penyaluran pembiayaan yang diakibatkan turunnya tingkat bunga riil (Aziz, 2013).

Tingkat inflasi, jumlah nasabah dan pendapatan sewa modal (*ujrah*) merupakan indikator yang tepat untuk menganalisis penyaluran pembiayaan rahn dari tahun 2003- 2016. Fluktuasi tingkat inflasi berpengaruh terhadap naiknya harga pokok barang baik untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* di PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah nasabah berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016?

2. Apakah pendapatan sewa modal berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016?
3. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016?
4. Apakah jumlah nasabah, pendapatan sewa modal, dan tingkat inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah nasabah terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan sewa modal terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016.

4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah nasabah, pendapatan sewa modal dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Merupakan suatu pembelajaran dalam upaya menganalisis suatu laporan keuangan sehingga penulis dapat mempraktikkan teori yang didapatkan selama masa perkuliahan dalam memecahkan masalah.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi, serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Bagi pihak lain

Memberikan pemahaman dan informasi mengenai keadaan keuangan PT Pegadaian (Persero) Indonesia kepada nasabah dan masyarakat umum khususnya pada produk *rahn*.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pengantar keseluruhan skripsi. Pada bab ini terdapat lima sub bab, yaitu latar belakang masalah yang menguraikan tentang alasan penelitian ini perlu untuk diteliti, rumusan masalah berisi tentang pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian berisi tentang apa yang ingin dicapai, manfaat penelitian berisi tentang kegunaan penelitian dan sistematika penulisan berisi tentang kerangka penyusunan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu tentang pegadaian syariah, pembiayaan, rahn, jumlah nasabah, pendapatan sewa modal, dan tingkat inflasi. Selain itu juga dibahas mengenai hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, hipotesis, serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan metode analisis data, pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dari pengolahan data laporan keuangan PT Pegadaian Indonesia tahun 2003-2017, mendeskripsikan hasil analisis data, uji hipotesis, dan pembahasan yang dibuktikan sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik kepada pihak-pihak terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pegadaian Syariah

2.1.1 Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberi kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Rodoni, 2015).

Menurut Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, pegadaian syari'ah adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan syari'ah berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai secara syar'i. Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian syari'ah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun* dilunasi. Menurut penulis

pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang kegiatan intinya menyalurkan dana bagi nasabah yang kelebihan dana dan memfasilitasi untuk yang kelebihan dana baik untuk tujuan konsumsi maupun produksi sesuai dengan prinsip syariah.

Pegadaian syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan sebagai hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Soemitra, 2015).

2.1.2 Ketentuan Hukum Pegadaian Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu yaitu (Soemitra, 2015) :

1) Rukun gadai: adanya ijab dan qabul, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai (*murtahin*), adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta, adanya utang (*marhun*).

2) Syarat sah gadai:

Rahn dan murtahin dengan syarat: kemampuan seseorang untuk bertransaksi, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.

Marhun dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya maka tidak sah, dapat dihitung jumlahnya. Marhun dengan syarat bisa diperjual belikan harus berupa harta yang bernilai, bisa dimanfaatkan secara syariah, dapat diketahui keadaan fisiknya, dan harus dimiliki.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III 2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali telah mendapat izin dari *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Akad gadai syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang menyertainya meliputi (Heykal, 2013):

1. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat di manfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan.
3. *Marhun* (barang yang digadaikan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman.
4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dapat di gadaikan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
5. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, dan pengelolaan serta administrasi.

2.1.3 Operasional Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional pegadaian syariah perlu diperhatikan untuk melihat keefektifan dan keefesienannya. Cara kerja pegadaian syariah tidak harus mempersulitkan calon nasabah yang akan melakukan pinjaman atau kegiatan lainnya. Pada pegadaian syariah akad, produk dan jasa yang dijual harus berlandaskan prinsip syariah yaitu alquran, hadist, dan ijma' ulama dan harus menjauhi kegiatan-kegiatan dilarang syariah yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Maka dalam operasional perlu pengawasan agar dapat mendukung jalannya pegadaian dengan prinsip syariah seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta yang sangat di perlukan perasaan manusia selalu mendapat pengawasan dari yang membuat aturan syariah yaitu Allah. Menurut beberapa ulama, mengenai prinsip-prinsip syari'ah yang dibuat acuan dalam operasi Pegadaian Syari'ah, yaitu ditinjau dari kedudukan barang gadai, pemanfaatan barang gadai, risiko atas kerusakan barang gadai, pemeliharaan barang gadai, kategori barang gadai, akad gadai, hak gadai atas harta peninggalan, pembayaran atau pelunasan utang gadai serta prosedur pelelangan barang gadai (Heykal, 2013).

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) Perum Pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut (Ali, 2008):

- 1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
- 2) Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga orang yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran ini hanya memungut biaya penaksiran.
- 3) Penitipan barang (*ij rah*), yaitu menyelenggarakan penitipan barang orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat dijalankan oleh karena pegadaian syariah memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Apalagi mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.

- 4) Gerai emas, yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah ke atas.

2.2 Rahn

2.2.1 Pengertian Rahn

Dalam hukum fiqih gadai disebut *ar-rahn*. *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang (Ali, 2008). *Ar-rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata: *rahana-rahnan* yang sinonimnya:

- a. *Tsabata*, yang artinya tetap
- b. *Dama*, yang artinya kekal
- c. *Habasa*, yang artinya menahan.

Menurut ulama Syafi'iyah gadai (*rahn*) adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana hutang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan (Muslich, 2013). Rahn adalah penyerahan barang dari nasabah (*rahin*) kepada pegadaian (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan utang (*qar*). *Qar* merupakan pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Darsono, 2017). Gadai syari'ah (*rahn*) merupakan menahan salah satu harta

milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang atau pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001).

Gadai syariah merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai melalui skim dengan jaminan berupa barang bergerak untuk jangka waktu empat bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu atau diperpanjang saat pinjaman telah jatuh tempo. Nasabah dikenakan *ujrah* yang dihitung dari nilai taksiran barang jaminan yang disimpan di perusahaan sebagai rekening. Pinjaman dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif sesuai dengan prinsip syariah. Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat mengambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah hak untuk menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pelunasan maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya.

2.2.2 Landasan Hukum Rahn

Dalil-dalil yang menjadi rujukan dari pada pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Alquran

Dasar hukum gadai syari'ah terdapat dalam Al-quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ^ص
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ^ر
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ق وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S al-Baqarah [2]: 283).

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Alquran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang - piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Sekalipun ayat tersebut, mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seorang musafir ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap/bermukim (Ali, 2008).

2. Hadits

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْرٍ
شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ وَلَقَدَرَهْنَ دَرَعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا
لِأَهْلِهِ

Artinya: “Dari Anas, ia berkata, Nabi saw, pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya.” (HR: Ahmad, Bukhari, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

3. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari

seorang Yahudi. Para sahabat juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika Nabi beralih dari yang biasanya berinteraksi dengan para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dianggap sebagai sikap Nabi Muhammad Saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada mereka (Ali, 2008).

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

- Keputusan No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (gadai).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

2.2.3 Rukun Rahn

Adapun rukun-rukun rahn adalah sebagai berikut (Muslich, 2013):

- 1) *Aqid* (pihak yang berakad), yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*)
- 2) *marhun* (jaminan/barang)
- 3) *marhun* (utang)
- 4) *shighat* (ijab qabul)

2.2.4 Syarat Rahn

Adapun yang menjadi syarat-syarat rahn adalah sebagai berikut:

- a. *Rahn* dan *murtahin* dengan syarat-syarat: kemampuan untuk melakukan transaksi, setiap orang yang sah melakukan jual beli maka sah melakukan gadai.
- b. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.
- c. *Marhun* (utang) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.
- d. Syarat *marhun* (barang)

Syafi'iyah mengemukakan beberapa syarat dalam akad gadai antara lain sebagai berikut:

- Barangnya sah diperjual belikan
- Barangnya dikuasai oleh *rahin*
- Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
- Barangnya harus suci.
- Barang yang digadaikan harus *m l mutaqawwim*.

2.2.5 Praktik

Pada dasarnya pergadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu (Soemitra, 2015):

1. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *ij rah*. *Ij rah* yaitu akad pemindahan hak guna atas jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah di sediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga yang di perhitungkan dari uang pinjaman. Produk pegadaian ini memberikan skim pinjaman

dengan syarat penahanan agunan. Serta nasabah harus membayar sejumlah uang sewa selama barang dipegadaian.

Prosedur pemberian pinjaman dilakukan melalui tahap-tahap berikut (Soemitra, 2015):

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* disertai lampiran fotokopi identitas dan barang jaminan ke loket.
3. Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman/ *marhun* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
5. Apabila telah disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Kemudian nasabah melakukan akad dengan kesepakatan:

- 1) Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum 4 bulan.
- 2) Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp90 (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp10.000 per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- 3) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk:

- 1) Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan.
- 2) Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi.

- 3) Atau hanya membayar jasa simpanan saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka pegadaian syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, pegadaian akan menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada Badan Amil Zakat sebagai Zakat Infak Sedekah (ZIS) (Huda, 2013).

Pengelolaan pinjaman dan biaya administrasi yang di terapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel berikut (Soemitra, 2015):

Tabel 2.1 Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Golongan Marhun	Plafon Marhun (Rp)		Biaya Administrasi (Rp)
A	20.000	150.000	1.000
B	151.000	500.000	5.000
C	501.000	1.000.000	8.000

Golongan Marhun	Plafon Marhun (Rp)		Biaya Administrasi (Rp)
D	1.005.000	5.000.000	16.000
E	5.010.000	10.000.000	25.000
F	10.050.000	20.000.000	40.000
G	20.100.000	50.000.0000	50.000
H	50.100.000	200.000.000	60.000

Sumber: Soemitra, 2015.

Tabel 2.2 Tarif Jasa Simpan dan Pemeliharaan

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas, berlian	Taksiran/ Rp10.000 x Rp85 x jangka waktu/10hari
2	Elektronik	Taksiran/ Rp10.000 x Rp90 x jangka waktu/10hari
3	Kendaraan bermotor	Taksiran/ Rp10.000 x Rp95 x jangka waktu/10hari

Sumber: Soemitra, 2015.

- Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/marhun
- Tarif ijarah dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

2.3 Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005). Pembiayaan juga merupakan penyediaan dana berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya sesuai dengan persyaratan dalam akad pembiayaan (Swiknyo, 2009).

Sedangkan M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (Antonio, 2001). Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.3.2 Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang ada antara lain (Laksana, 2009):

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuannya
 - a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan produktif yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
 - b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
 - c. Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan barang untuk dijual kembali.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
 - a. Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*) yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan (*long term financing*) yang berjangka waktu maksimal 3 tahun.
- 3) Pembiayaan dilihat dari segi penggunaannya
 - a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran modal usaha antara lain, untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya

produksi, seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi dan sebagainya.

- b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal serta jasa yang digunakan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan dan pembangunan pabrik.
- c. Pembiayaan multi guna yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, pembiayaan berbagai aneka peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.

Menurut Karim (2017), pembiayaan syariah secara umum dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan yaitu :

- 1) Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- 2) Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari.
- 3) Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.

- 4) Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu.
- 5) Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
- 6) Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

Pembiayaan sangat didorong dalam islam hanya saja yang membedakan pembiayaan tergantung pada siapa dan apa yang dibiayai. Ada tiga katagori pembiayaan (Khan, 2014) :

1. Pembiayaan yang menghasilkan *return (return bearing financing)* bagi kegiatan komersial yang berpotensi laba. Disini pemilik modal pemilik modal juga bersedia memikul resiko akan terjadinya kerugian. Baik pokok modal atau *return* nya tidak dijamin.
2. Pembiayaan yang tidak menghasilkan *return (return free financing)* bagi kegiatan yang tidak menguntungkan secara komersial. Tidak ada *return* yang diharapkan namun pokok modal dapat ditagih, tergantung pada kemampuan peminjam.
3. Pembiayaan sedekah bagi kaum fakir dan miskin.

Dalam Pegadaian syariah pembiayaan rahn termasuk dalam katagori (b) karena ini adalah kewajiban moral, orang yang kekurangan dana minta kepada yang kelebihan dana. Pinjaman

yang diberikan dalam pegadaian disebut dengan *outstanding*. Pinjaman yang diberikan adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan skema produk yang ditawarkan oleh Perseroan dengan mengacu pada nilai barang yang dijaminkan, jangka waktu, dan peruntukannya.

2.3.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut (Rivai, 2008) :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Produk penyaluran dana ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan baik menggunakan pola bagi hasil

(*muḍ rabah, musy rakah*), dalam pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam dan istishna'*) dan maupun pola sewa (Ascarya, 2007).

2.3.4 Pembiayaan Rahn

Pembiayaan dalam islam bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesuksesan serta kemaslahatan, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh islam (Hulwati, 2009). Harapannya bahwa sistem pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim bebas dari semua praktik yang mengandung riba. Oleh karena itu pembiayaan yang bebas riba dapat dilaksanakan oleh institusi keuangan islam salah satunya yaitu Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga keuangan non-perbankan.

Rahn (*mortgage*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah (Ascarya, 2007). Menurut penulis pembiayaan rahn adalah penyaluran dana dari orang yang kelebihan dana kepada orang yang kekurangan dana dengan menyerahkan barang tertentu sebagai agunan, dan agunan tersebut dapat dijual pada saat jatuh tempo jika yang menerima dana tidak dapat melunasi dana tersebut.

2.4 Nasabah

2.4.1 Pengertian Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah. Maka nasabah yang memanfaatkan pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah merupakan nasabah fasilitas, karena nasabah telah mendapatkan dana dengan menjadikan suatu barang sebagai agunan atas hutang tersebut.

Kasmir mendefinisikan nasabah adalah aset atau kekayaan utama perusahaan. Bahkan ada istilah yang mengatakan “pelanggan adalah raja” yang semua kebutuhan dan keinginannya harus terpenuhi. Untuk kalimat pelanggan lebih sering digunakan untuk pada jasa non keuangan, seperti supermarket, hotel dan lainnya. Sementara itu istilah nasabah sering digunakan pada lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pegadaian. Namun, dalam pelayanan tetap sama karena kedua istilah tersebut mengandung

arti yang sama, perbedaan yang melekat hanyalah terletak pada pelayanan sebagian kecil saja (Kasmir, 2013).

Berdasarkan pengertian diatas penulis memberi kesimpulan bahwa nasabah pegadaian adalah orang atau badan usaha yang menjadi pelanggan Pegadaian. Sama halnya bank, perum pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menjual kepercayaan (pembiayaan) dan jasa juga memperoleh imbalan dari penyaluran pembiayaan dan pemberian jasa tersebut. Oleh karena itu, PT Pegadaian (Persero) berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara peningkatan kualitas pelayanan, memperbesar dana, memperluas pemberian kredit, dan jasa-jasa lainnya (Sinarti, 2012).

2.5 Pendapatan Sewa Modal

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan seperti penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti dan penjualan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan (Antonio, 2001). Modal adalah sejumlah dana yang

digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perusahaan umumnya (Swiknyo, 2009).

Sumber-sumber pendapatan dapat dikelompokkan menjadi 2 sumber pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara berulang-ulang dan berkesinambungan tiap periode.
- 2) Pendapatan bukan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan yang tidak berulang-ulang, yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan.

Pendapatan sewa modal adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha penyaluran uang pinjaman. Pendapatan sewa modal diperoleh dari pengenaan tarif sewa modal yang dinamis, sesuai dengan tingkat persaingan dan kemampuan perusahaan (Sinarti, 2012). Dalam pegadaian syariah pendapatan sewa modal disebut dengan ujarah. Tarif ujarah dihitung menggunakan persentase dari nilai taksiran dengan dihitung per 10 hari penyimpanan (gudang) sesuai penggolongan marhun dan jenis marhun yang disimpan meliputi emas (untuk marhun emas) dan non emas (untuk marhun selain emas seperti elektronik, alat rumah tangga, dan kendaraan).

2.6 Inflasi

2.6.1 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu (Karim, 2017). Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2002). Sedangkan dalam kamus Bank Indonesia (BI) inflasi merupakan suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi juga diartikan gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya harga secara umum dan berkesinambungan (Hasyim, 2016). Keadaan ketika harga dari satu atau beberapa jenis barang naik, maka itu bukanlah dapat dikatakan sebagai inflasi. Namun, jika harga barang yang naik tersebut meluas dan menyebabkan naiknya sebagian besar dari barang-barang lainnya itulah yang dinamakan dengan inflasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi. Pertama adalah kenaikan harga secara umum dan yang kedua adalah terus-menerus. Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dan selanjutnya kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum. Hanya kenaikan harga secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi. Hal ini penting untuk membedakan kenaikan harga atas barang dan jasa tertentu. Misalnya, meningkatnya harga bawang merah atau harga cabe merah saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya

inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan dalam suatu perekonomian. Kata yang ke dua adalah terus menerus, kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga karena faktor musiman misalnya menjelang hari-hari besar tidak disebut inflasi. Kenaikan harga sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan juga tidak dapat disebut inflasi karena kenaikan harga tersebut bukan masalah ekonomi.

Inflasi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu Negara ke Negara lain. Ada kalanya tingkat inflasi adalah rendah yaitu mencapai 4-6 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai diantara 5-10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa ratus atau beberapa ribu persen dalam setahun (Ardiyanto, 2015).

2.6.2 Teori Inflasi

Beberapa teori yang menjadi landasan terjadinya inflasi yaitu:

a. Teori kuantitas

Teori kuantitas disebabkan oleh jumlah yang beredar melebihi kebutuhan dan adanya ekspektasi, atau perkiraan masyarakat mengenai kecendrungan kenaikan harga-harga pada masa yang akan datang. Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan

tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

b. Teori Keynes

Menurut teori Keynes inflasi disebabkan oleh permintaan total terhadap barang dan jasa yang melebihi kemampuan memproduksi masyarakat. Aliran Keynesian tidak sepenuhnya sependapat dengan teori kuantitas. Ekonom Keynesian menyatakan bahwa teori kuantitas tidak valid karena teori tersebut mengasumsikan ekonomi dalam kondisi *full employment* (kapasitas ekonomi penuh). Dalam kondisi kapasitas ekonomi yang belum penuh, maka ekspansi (pertambahan) uang beredar justru akan menambah output (meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja) dan tidak akan meningkatkan harga. Lebih lanjut dikatakan bahwa uang tidak sepenuhnya netral, pertambahan uang beredar dapat mempunyai pengaruh tetap (permanen) terhadap variabel riil seperti output dan suku bunga. Pendekatan Keynes juga menyatakan bahwa teori kuantitas yang mengasumsikan elastisitas dan perputaran uang (*velocity of circulation*) adalah tetap juga tidak benar. Elastisitas dan perputaran uang sangat sulit diprediksi dan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta perubahan barang-barang yang merupakan substitusi uang (*financial assets*). Hal tersebut terbukti bahwa dalam suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah maju dan terdapat instrumen-instrumen keuangan yang berfungsi

sebagai substitusi uang, maka perputaran uang akan menjadi semakin sulit diprediksi.

c. Teori strukturalis

Teori strukturalis adalah pengiring yang alami bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga inflasi tidak dapat dikendalikan melalui kebijakan fiskal ataupun moneter tanpa menimbulkan pengangguran atau stagnansi dalam pertumbuhan ekonomi. Teori ini lebih didasarkan pada pengalaman negara-negara di Amerika Latin. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi terutama di negara berkembang disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian. Menurut teori ini ada dua masalah struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. Pertama, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh *terms of trade* yang memburuk dan produksi barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga. Dengan melambatnya pertumbuhan ekspor, maka akan terhambat kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Seringkali negara berkembang melakukan kebijakan substitusi impor meskipun dengan biaya yang tinggi dan mengakibatkan harga barang yang tinggi sehingga menimbulkan inflasi.

Permasalahan selanjutnya yaitu masalah struktural perekonomian negara berkembang lainnya berupa produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis, yaitu pertumbuhan

produksi makanan dalam negeri tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita sehingga harga makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga barang-barang lainnya. Hal ini mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri yang selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi dan pada gilirannya akan menimbulkan inflasi. Sementara itu, proses inflasi, dalam prakteknya, kemungkinan dapat mengandung aspek-aspek dari ketiga teori inflasi tersebut (Suseno, 2009).

d. Teori Inflasi Islam

Ekonom Islam Taquiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M-1441M), menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu (Karim, 2017):

1) *Natural Inflation*

Inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah dimana orang tidak mempunyai kendali dalam hal mencegah. Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan turunnya Penawaran Agregat (AS) atau naiknya Permintaan Agregat (AD). Jika memakai persamaan analisis konvensional yaitu (Karim, 2017):

$$MV = PT = Y \quad (2.1)$$

Dimana :

M = jumlah uang beredar

V = kecepatan peredaran uang

P = tingkat harga

T = jumlah barang dan jasa (kadang juga dipakai notasi Q)

Y = tingkat pendapatan nasional (GDP)

Maka dapat diartikan bahwa *natural inflation* merupakan gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (T). Misalnya T naik sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya P naik. Maka *natural inflation* akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan yaitu:

- a) Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dimana ekspor naik sedangkan impor turun sehingga net export nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregat (AD).
- b) Akibat turunnya tingkat produksi (AS), karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo dan boikot.

2) *Human Error Inflation.*

Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada natural inflation, maka inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai *human error inflation* atau *false inflation*. *Human error inflation* dikatan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri (QS Al-Rum 30:41). *Human error inflation* dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut:

- a) Korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption and bad administraion*).

- b) Pajak yang berlebihan (*excessive tax*)
- c) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*).

2.6.3 Penyebab Inflasi

Inflasi merupakan permasalahan yang terus mendapat perhatian setiap negara, karena inflasi dapat dijadikan indikator kesehatan ekonomi negara tersebut. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang rendah. Adakalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba akibat dari peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah, misalnya efek dari ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali (Sukirno, 2011).

Terdapat berbagai kelompok besar dari inflasi adalah (Huda, 2013) :

- a. *Policy inducade*, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.
- b. *Cost-push inflation*, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah.
- c. *Demand-pull inflation*, disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum.

- d. *Intertial inflation*, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan, dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak, finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlanjut.

Berdasarkan parah tidaknya, inflasi dapat dikelompokkan menjadi (Hasyim, 2016):

- a) Inflasi ringan jika terjadi kurang dari 10% setahun.
- b) Inflasi sedang bila terjadi berkisar dari 10-30% setahun.
- c) Inflasi berat terjadi antara 30-100% setahun.
- d) Hiperinflasi bila terjadi lebih dari 100% setahun.

2.6.4 Dampak Inflasi

Inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi. Jika sekiranya konsumen memperkirakan bahwa tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang ketimbang mereka menunggu dimana tingkat harga sudah meningkat lagi. Begitu pula halnya dengan bank, atau lembaga peminjaman (*lenders*) lainnya, jika sekiranya mereka menduga bahwa tingkat inflasi akan naik di masa mendatang, maka mereka akan mengenakan tingkat bunga tinggi atas pinjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi dalam menghadapi penurunan pendapatan riil dan kekayaan. Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di

pasar modal. Hal ini akan menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya investor swasta tertekan sampai kebawah tingkat keseimbangannya, yang disebabkan oleh keterbatasan penawaran dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds*). Oleh karena itu, selama inflasi menuntun kearah tingkat bunga riil yang rendah dan ketidakseimbangan pasar modal, maka inflasi tersebut akan menurunkan investasi dan pertumbuhannya (Nanga, 2005)

Selain itu menurut N. Gregory Mankiw (2014) inflasi menyebabkan beberapa biaya sosial dalam perekonomian baik inflasi yang diharapkan maupun inflasi yang tidak diharapkan, yaitu penurunan jumlah uang yang dipegang, sehingga mendorong perusahaan lebih sering mengubah harga, di mana akan menambah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, menimbulkan distorsi dalam pajak yang dibebankan, menimbulkan ketidaknyamanan hidup dengan seringnya terjadi perubahan harga, terjadinya redistribusi kekayaan antar individu, dan menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor dan debitor.

Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. Menurut Robert Mundell

inflasi juga memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Nanga, 2005). Namun, penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi dampaknya tidak akan sama terhadap seluruh masyarakat. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap misalnya, pegawai negeri, adalah kelompok masyarakat yang menderita akibat inflasi. Kelompok masyarakat berpendapatan tetap tersebut akan menderita karena secara riil pendapatannya akan menurun atau menjadi lebih kecil. Sementara kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan untuk melindungi diri tidak menerima beban yang sama sebagai akibat adanya inflasi. Ketidakpastian besarnya laju inflasi juga dapat mengakibatkan semakin seriusnya beban atau bahaya inflasi (Suseno, 2009).

Menurut para ekonom islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena (Karim, 2017):

- 1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang terutama fungsi tabungan (nilai simpan). Orang harus melepaskan diri dari uang atau aset keuangan.
- 2) Melemahkan semangat menabung dan sikap menabung dari masyarakat turun.
- 3) Meningkatkan kecendrungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang barang mewah.
- 4) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya.

2.6.5 Indikator Inflasi

Beberapa indeks yang sering digunakan untuk mengukur inflasi seperti (www.bi.co.id):

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) merupakan harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
3. *Gross Domestic Bruto* (GDP) Deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP diperoleh dengan membagi GDP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GDP riil yaitu GDP atas dasar harga konstan/tahun dasar.

2.7 Penelitian Terdahulu

Purnomo (2009), Pengaruh pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika periode 2004-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dan jumlah nasabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika.

Widiarti dan Sinarti (2013) Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit pada Perum Pegadaian Cabang Batam Periode 2008-2012. Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan Perum Pegadaian Cabang Batam dan jumlah nasabah mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Cabang Batam, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Batam. Namun secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Batam.

Desriani dan Rahayu (2013), Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Periode Maret 2009 - September 2011). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan, harga emas dan tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Secara parsial, yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit adalah pendapatan dan harga emas

Aziz (2013) Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linier

berganda. Hasil penelitian ini adalah tingkat sewa modal dan inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit gadai golongan C. Jumlah nasabah dan harga emas mempengaruhi jumlah penyaluran kredit di PT. Pegadaian Cabang Probolinggo. Berdasarkan keempat variabel bebas diketahui bahwa yang paling dominan pengaruhnya terhadap jumlah kredit gadai yang disalurkan adalah variabel harga emas karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung yang paling besar.

Febrian (2015) Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit *Rahn* Pada PT Pegadaian Syariah Di Indonesia Periode 2005-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kredit rahndengan probabilitas t-statistik 0,892. Sedangkan pendapatan pegadaian dan harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit rahn pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 dan 0,000.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Variabel yang digunakan
Pengaruh pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit pada Perum gadaian Syariah Cabang Dewi Sartika periode 2004-2008 (Ade Purnomo, 2009).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dan jumlah nasabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika	Pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi, dan penyaluran kredit.
Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit pada Perum	Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan Perum Pegadaian Cabang Batam dan jumlah nasabah mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum	Pendapatan, jumlah nasabah, tingkat inflasi dan penyaluran kredit.

<p>Pegadaian Cabang Batam Periode 2008-2012 (Widiarti dan Sinarti, 2013).</p>	<p>Pegadaian Cabang Batam, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Batam. Namun secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Batam.</p>	
<p>Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Jombang, Periode Maret 2009- September 2011) (Desriani, Rahayu, 2013).</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan, harga emas dan tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Secara parsial, yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit adalah pendapatan dan harga emas.</p>	<p>Pendapatan harga, emas, tingkat inflasi dan penyaluran kredit.</p>

<p>Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo) (Aziz, 2013).</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah tingkat sewa modal dan inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit gadai golongan C. Jumlah nasabah dan harga emas mempengaruhi jumlah penyaluran kredit di PT. Pegadaian Cabang Probolinggo. Berdasarkan keempat variabel bebas diketahui bahwa yang paling dominan pengaruhnya terhadap jumlah kredit gadai yang disalurkan adalah variabel harga emas karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung yang paling besar.</p>	<p>Tingkat sewa modal, jumlah nasabah, harga emas, tingkat inflasi dan penyaluran kredit gadai golongan C.</p>
<p>Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kredit rahn dengan</p>	<p>Inflasi, pendapatan pegadaian, harga emas.</p>

Terhadap Penyaluran Kredit <i>Rahn</i> Pada PT Pegadaian Syariah Di Indonesia Periode 2005-2013 (Danny Febrian, 2015).	probabilitas t-statistik 0,892. Sedangkan pendapatan pegadaian dan harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit <i>Rahn</i> pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 dan 0,000.	
--	---	--

Sumber: Data Diolah, 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: peneliti menggunakan variabel penyaluran pembiayaan *rahn* sebagai variabel dependen serta jumlah nasabah, pendapatan sewa modal dan tingkat inflasi sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan pada PT Pegadaian Indonesia (Persero) tahun 2003-2016.

2.8 Keterkaitan Variabel

2.8.1 Keterkaitan Antara Jumlah Nasabah dengan Pembiayaan *Rahn*

Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Antonio, 2001). Layaknya bank, perum pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menjual kepercayaan (pembiayaan) dan jasa juga memperoleh imbalan dari penyaluran

pembiayaan dan pemberian jasa tersebut. Oleh karena itu, perum Pegadaian berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara peningkatan kualitas pelayanan, memperbesar dana, memperluas pemberian kredit, dan jasa-jasa lainnya (Sinarti, 2012). Dalam pegadaian nasabah merupakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk berhubungan dengan pagadaian. Nasabah yang datang ke pegadaian memiliki tujuan dan maksud yang beragam ada nasabah yang tujuannya untuk bertransaksi ataupun menabung, misalnya membeli barang-barang lelang dan ada juga nasabah yang membutuhkan pinjaman uang. Namun dalam konteks pinjaman ini nasabah harus menyerahkan barang yang dimiliki sebagai agunan atas hutang yang diberikan. Semakin banyak jumlah nasabah maka akan semakin meningkat lajunya sebuah perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Purnomo (2009) menunjukkan bahwa jumlah nasabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan Aziz (2013) bahwa jumlah nasabah mempengaruhi jumlah penyaluran kredit golongan C di PT. Pegadaian Cabang Probolinggo.

2.8.2 Keterkaitan Antara Pendapatan Sewa Modal dengan Pembiayaan *Rahn*

Pendapatan sewa modal adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha penyaluran uang pinjaman. Pendapatan sewa modal diperoleh dari

pengenaan tarif sewa modal yang dinamis, sesuai dengan tingkat persaingan dan kemampuan perusahaan. Pendapatan sewa modal atau yang disebut juga *ujrah*. Perum Pegadaian selain melayani kepentingan umum, juga bertujuan untuk mendapatkan laba. Untuk itu Perum Pegadaian terus berupaya meningkatkan fasilitas yang diberikan. Hal ini guna meningkatkan pendapatan yang berasal dari biaya administrasi, biaya pemeliharaan, uang kelebihan kadaluwarsa, jasa taksiran, jasa titipan, dan lain-lain. Oleh karena itu, semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan kepada nasabahnya (Sinarti, 2012).

Dana yang digunakan untuk menyalurkan pinjaman kepada nasabah berasal dari pinjaman jangka pendek pihak ketiga yaitu perbankan dan investor. Selain dari dana pinjaman dari bank dan investor, dana yang digunakan untuk kredit berasal dari pendapatan pegadaian. Oleh karena itu, pendapatan pegadaian dapat dikatakan mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan (Febrian, 2015). Perusahaan pegadaian juga menyediakan berbagai macam produk, sehingga dari itu pegadaian memperoleh pendapatan, salah satunya yaitu pendapatan sewa modal yang diperoleh dari jasa penyimpanan barang-barang agunan. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh akan semakin banyak pula pembiayaan rahn yang dapat disalurkan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinarti (2013) bahwa pendapatan Perum

Pegadaian Cabang Batam mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Cabang Batam

2.8.3 Keterkaitan Antara Tingkat Inflasi dengan Pembiayaan *Rahn*

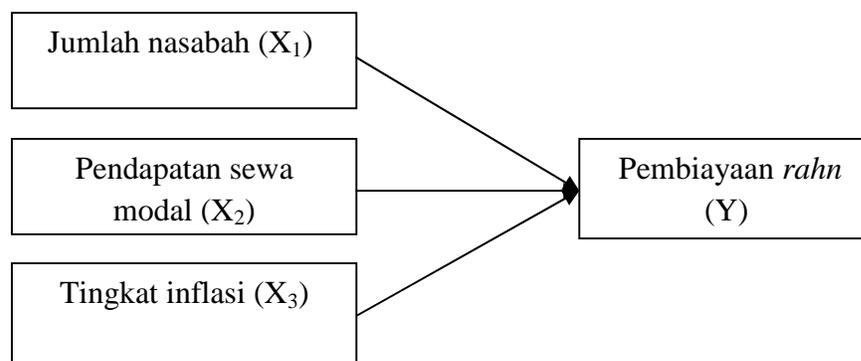
Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Mankiw, 2014). Inflasi membawa dampak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang tunai. Masyarakat akan mengalihkan uang tunai ke dalam investasi yang tetap seperti tanah. Padahal, sumber dana potensial dari masyarakat tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan jika tidak diinvestasikan secara langsung pada sektor produktif, atau disalurkan pada masyarakat peminjam dan melalui lembaga keuangan. Inflasi mempengaruhi besarnya penyaluran kredit. Pengaruh inflasi ini melalui tingkat bunga nominal, dikarenakan tingkat bunga riil yang terbentuk dari tingkat bunga nominal dikurangi inflasi. Apabila tingkat inflasi tinggi maka tingkat bunga riil akan menurun, ini akan mengakibatkan naiknya jumlah penyaluran kredit yang diakibatkan turunnya tingkat bunga riil. Pengaruh perubahan inflasi pada penyaluran kredit terjadi tidak secara langsung akan tetapi melalui tingkat bunga riil terlebih dahulu (Aziz, 2013).

Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan kredit, dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin naiknya harga, maka seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan

cara mengajukan permintaan kredit dengan menggunakan asumsi suku bunga riil. Oleh karena itu maka dengan adanya kenaikan inflasi maka permintaan akan kredit juga semakin meningkat (Aziz, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2009) menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika. Begitu pula yang dilakukan oleh Sunarti (2013) bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Batam. Aziz (2013) penelitian yang dialkukannya memberikan hasil bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit gadai golongan C.

2.9 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka berfikir

Keterangan :

1. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah penyaluran pembiayaan *rahn* (Y).
2. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah jumlah nasabah (X_1), pendapatan sewa modal (X_2) dan tingkat inflasi (X_3).

2.10 Hipotesis

Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak menggunakan istilah hipotesis nol (H_0). Penolakan H_0 mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternatif (H_1) (Walpole, 1995). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis jumlah nasabah, pendapatan sewa modal, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh jumlah nasabah terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*.
 H_1 : Terdapat pengaruh jumlah nasabah terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*.
2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh pendapatan sewa modal terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*.

H_1 : Terdapat pengaruh pendapatan sewa modal terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

3. H_0 : Tidak terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

H_1 : Terdapat pengaruh jumlah nasabah terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

4. H_0 : Tidak terdapat pengaruh jumlah nasabah pendapatan sewa modal dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

H_1 : Terdapat jumlah nasabah, pendapatan sewa modal dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sesuai masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bermaksud menggambarkan fenomena pada objek penelitian apa adanya dan pengambilan kesimpulan didasarkan pada angka-angka hasil analisis statistik. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis jumlah nasabah, pendapatan sewa modal dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian (Persero) di Indonesia tahun 2003-2016.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Pada penelitian ini data indikator jumlah nasabah, pendapatan sewa modal bersumber dari PT Pegadaian (Persero) di Indonesia dan tingkat inflasi bersumber dari Bank Indonesia (BI) periode 2003-2016. Data yang digunakan adalah data tahunan dalam bentuk data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2003 sampai 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan PT Pegadaian (Persero) di Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari publikasi Bank Indonesia (BI),

PT Pegadaian (Persero) Indonesia, sumber sumber lain yang dipublikasikan, dan penelitian sebelumnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian (Bungin, 2010). Maka dapat dikatakan bahwa metode pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan data. Pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

3.3.1 Metode Kepustakaan

Data yang diambil penulis dalam metode kepustakaan ini berasal dari jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis, buku-buku literatur mengenai pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, tingkat inflasi, penyaluran pembiayaan, dan penelitian sejenis.

3.3.2 Metode Penelusuran Data Online

Metode penelusuran data online yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online (Bungin, 2010). Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah penelusuran data *online*. Data yang diambil menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pegadaian syariah tahun 2003-2016, yang diperoleh melalui *website* www.pegadaian.co.id dan www.bi.co.id.

3.4 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel-variabel indikator jumlah nasabah, pendapatan sewa modal, tingkat inflasi. Untuk memahami setiap variabel yang digunakan, maka diberikan definisi variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No	Jenis Variabel	Singkatan	Nama Variabel
1	Dependen	Y	Pembiayaan rahn (miliar rupiah)
2	Independen	X ₁	Jumlah nasabah (orang)
		X ₂	Pendapatan sewa modal (miliar rupiah)
		X ₃	Tingkat inflasi (persen)

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independen. Variabel ini sering disebut juga variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Purwanto, 2015). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan *rahn* (Y). Menurut ulama Syafi'iyah gadai (*rahn*) adalah menjadikan sesuatu benda

sebagai jaminan untuk utang, dimana hutang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan (Muslich, 2013). Data penyaluran pembiayaan rahn diperoleh dari laporan tahunan (*Annual Report*) PT Pegadaian (Persero) Indonesia. Data yang digunakan adalah data penyaluran pembiayaan rahn berupa data tahunan selama rentang waktu 14 tahun yaitu 2003-2016.

3.4.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah (X_1), pendapatan sewa modal (X_2), dan tingkat inflasi (X_3). Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Antonio, 2001). Maka jumlah nasabah pada pegadaian adalah jumlah orang yang berhubungan dengan pegadaian. Data jumlah nasabah diperoleh dari laporan tahunan (*Annual Report*) PT Pegadaian (Persero) Indonesia. Data yang digunakan adalah jumlah nasabah perorangan berupa data tahunan selama rentang waktu 14 tahun yaitu 2003-2016.

Pendapatan sewa modal adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha

penyaluran uang pinjaman. Pendapatan sewa modal diperoleh dari pengenaan tarif sewa modal sesuai dengan kemampuan perusahaan (Sinarti, 2012). Data pendapatan sewa modal diperoleh dari laporan tahunan (*Annual Report*) PT Pegadaian (Persero) Indonesia. Data yang digunakan adalah data pendapatan sewa modal dalam satuan jutaan rupiah berupa data tahunan selama rentang waktu 14 tahun yaitu 2003-2016. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/ komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu (Karim, 2017). Data inflasi adalah data tentang laju inflasi yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan dinyatakan dalam bentuk persen selama rentang waktu 14 tahun yaitu 2003-2016.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut menyimpang dari asumsi-asumsi klasik. Asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan

dengan melihat nilai *Asymp. Sig.* pada hasil uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (Suwarjeni, 2015). Ketentuan suatu model regresi berdistribusi secara normal apabila *probability* dari *Kolmogrov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah adanya suatu kolerasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen (bebas). Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*) (Janie, 2012). Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinieritas adalah dengan *Variance Inflation Factor* (VIF), korelasi person antara variabel-variabel bebas atau dengan melihat *eigenvalues* dan *Condition Index* (CI).

Penelitian ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Suwarjeni, 2015). Apabila salah satu dari nilai VIF lebih dari 10, maka dapat diidentifikasi bahwa terdapat masalah multikolinieritas (Husna, 2017). Nilai VIF dapat juga dihitung berdasarkan rumus:

$$VIF_i = (1 - R^2_i)^{-1} \quad (3.1)$$

Dimana R^2_i adalah koefisien determinan yang diperoleh jika peubah X_i diregresikan dengan $p-1$ peubah bebas lainnya.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (*distrubance term*) dalam analisis regresi berganda. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari *autokorelasi*. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi seperti *graphical method*, *run test*, uji Breusch-Pagan-Godfrey, dan uji Durbin Watson. Pada penelitian ini pengujian asumsi autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat permasalahan autokorelasi apabila (Janie, 2012) :

$$d_u < d < 4 - d_u \quad (3.1)$$

Dimana: d = nilai Durbin Watson hitung

d_u = nilai batas atas / upper Durbin Watson tabel

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu fenomena dimana estimator regresi bias, namun varian tidak efisien (semakin besar populasi atau sampel, semakin besar varian) (Widarjono, 2007). Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi ada atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai *absolute residual* (AbsUt) terhadap variabel independen lainnya (Janie, 2012). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana. Jika regresi linier sederhana mempersoalkan tentang hubungan peubah tak bebas atau peubah kriteria (*respons*) dengan suatu peubah bebas (*deteministik*), maka pada regresi linier ganda mempersoalkan hubungan linier antara satu peubah tak bebas dengan beberapa peubah bebas (Lungan, 2006).

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan antara jumlah nasabah, pendapatan sewa modal dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2003-2016 secara bersama-sama dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i \quad (3.2)$$

Keterangan :

Y = variabel dependen yaitu penyaluran pembiayaan *Rahn*

X₁ = jumlah nasabah

X₂ = pendapatan sewa modal

X₃ = tingkat inflasi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

a = variabel/bilangan konstan

e = nilai error

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara individu dengan uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Pengujian hipotesis secara individu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus (Gujarati, 2007):

$$t = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{se \hat{\beta}_i} \quad (3.3)$$

Uji hipotesis dapat diketahui dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} sebagai berikut:

- H₀ : $\beta_i = 0$, artinya masing-masing variabel X_i tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y, dimana i= 1,2,3
- H₁ : $\beta_i \neq 0$, artinya masing-masing variabel X_i memiliki pengaruh terhadap variabel Y, dimana i= 1,2,3.

Kriteria uji t adalah:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y)
 - Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y)
- Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 (5%) pada taraf signifikansi 95%.

3.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan merupakan kemampuan variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Uji t tidak dapat digunakan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus (Purwanto, 2015):

$$F_{k-1, n-k} = \frac{ESS/(n-k)}{RSS/(n-k)} \quad (3.4)$$

$$= \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Pengujian hipotesis pada uji F dapat diketahui dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel-variabel X secara bersama-sama terhadap Y
- $H_1 : \text{minimal } \beta_i \neq 0$, setidaknya ada 1 variabel bebas X yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Y dimana $i=1,2,3$.

Kriteria Uji F adalah:

- Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_0 ditolak (setidaknya ada 1 variabel bebas X yang berpengaruh terhadap variabel terikat Y).
- Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (keseluruhan variabel bebas X tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)).

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan bagian dari keragaman total variabel terikat (Y) yang dapat diterangkan oleh keragaman variabel bebas (X). Jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Koefisien determinasi majemuk dinyatakan dengan R^2 . Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus (Purwanto, 2015) :

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum X_1 Y + \beta_2 \sum X_2 Y + \beta_3 \sum X_3 Y + \beta_4 \sum X_4 Y}{\sum Y^2} \quad (3.5)$$

Besarnya nilai R^2 berada diantara 0 dan 1 yaitu $0 < R^2 < 1$. Jika nilai R^2 semakin mendekati 1 maka model tersebut baik dan pengaruh antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y semakin kuat (erat hubungannya). Semakin besar R^2 maka semakin baik kemampuan X menerangkan Y.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Pegadaian Syariah

Bangsa Indonesia telah mengenal pegadaian sejak menjalankan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Perkembangan produk-produk berbasis syariah sangat marak di Indonesia termasuk pegadaian. Menurut Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pegadaian syari'ah adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan syari'ah berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai secara syar'i. Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun* dalam bentuk *rahn*, itu dibolehkan dengan ketentuan bahwa *murtahin* dalam hal ini pegadaian syari'ah mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun* dilunasi.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada tahun 2003 (Ali, 2008). Kemudian menyusul pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Di tahun yang sama juga, 4 kantor pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Soemitra, 2010). Hingga saat ini PT Pegadaian (Persero) Indonesia

memiliki 1 kantor pusat, 12 kantor wilayah, 59 kantor area, 629 kantor cabang, dan 3.826 kantor unit pelayanan cabang (4.455 *outlet*). Sedangkan jumlah kantor pegadaian syariah di Indonesia sebanyak 611 *outlet*, 83 cabang dan 528 unit.

Pada umumnya visi dan misi pegadaian syariah tidak dapat dipisahkan dari visi misi PT Pegadaian (Persero) karena pegadaian syariah masih berada dalam naungan PT Pegadaian (Persero) Indonesia akan tetapi pada pegadaian syariah mengikuti prinsip-prinsip sesuai syariah. Visi pegadaian adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Artinya pegadaian dapat menjadi solusi kebutuhan dana melalui produk pembiayaan, kelebihan dana melalui produk investasi emas dan kebutuhan transaksi keuangan melalui jasa *multi payment online*. Adapun misi pegadaian adalah memberikan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan dapat berperan sebagai pembina usaha mikro dan kecil, melayani masyarakat dengan standar pelayanan yang didukung dengan *information teknologi (IT) online* diseluruh *outlet*, meningkatkan profitabilitas dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah seperti produk pembiayaan (Pegadaian, 2016).

Ditinjau dari segi produk yang ditawarkan dalam pegadaian syariah maka pegadaian syariah memiliki tiga jenis produk pembiayaan antara lain *pertama* gadai syariah (*rahn*) yaitu pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. *Kedua* produk *arrum* yaitu

pembiayaan yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), dan bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Produk arrum juga bisa di pakai oleh masyarakat yang ingin menunaikan ibadah Haji melalui Arrum Haji dengan jaminan emas dan bukti setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). *Ketiga* produk amanah yaitu pinjaman yang diperuntukkan bagi para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu dan bagi para pengusaha mikro kecil untuk kepemilikan kendaraan bermotor (www.pegadaiansyariah.co.id).

Sedangkan produk ditinjau dari segi lini bisnis yang terdapat pada Pegadaian Syariah ada empat produk antara lain yaitu produk mulia adalah layanan penjualan emas batang kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan fleksibel. Produk tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Produk konsinyasi emas yaitu layan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga emas milik nasabah aman karena disimpan di Pegadaian. Produk multi pembayaran *online* (MPO) yaitu layanan pembayaran cepat dalam bertransaksi seperti melayani pembayaran listrik, air, telpon, asuransi dan lain sebagainya secara *online* (www.pegadaiansyariah.co.id).

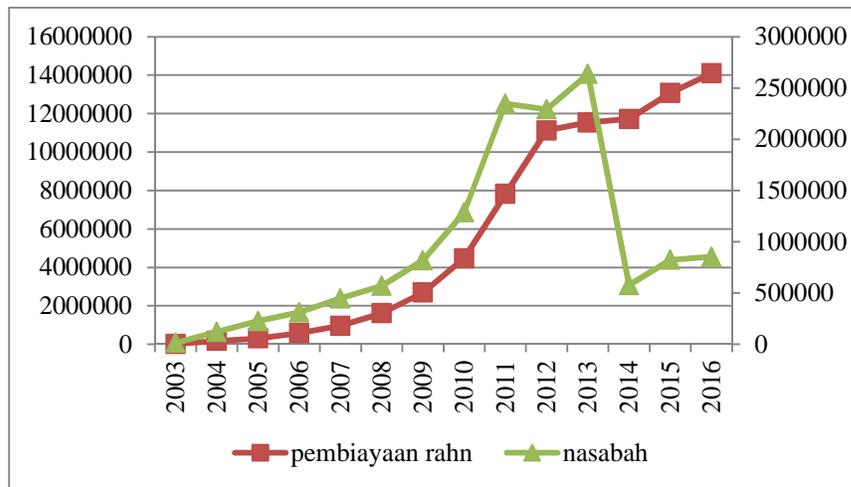
4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010).

4.2.1 Pembiayaan Rahn dan Jumlah Nasabah

Salah satu produk dari pegadaian syariah di Indonesia berupa pembiayaan rahn. Menurut ulama Syafi'iyah gadai (*rahn*) adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana hutang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan (Muslich, 2013). Kinerja pegadaian syariah dalam menyalurkan pembiayaan rahn terus meningkat dapat dilihat pada besarnya pembiayaan rahn yang diberikan. Tren nasabah saat ini datang kepegadaian yang memanfaatkan pembiayaan rahn untuk mendapatkan uang guna membiayai uang sekolah, sewa rumah atau mencari pendanaan usaha, hal ini menunjukkan bahwa rahn telah memperbaiki taraf kehidupan masyarakat.

Ada keterkaitan antara pembiayaan rahn dengan jumlah nasabah ditampilkan pada gambar 4.1 dibawah ini:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar: 4.1 Pembiayaan Rahn (Miliar Rupiah) dan Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Indonesia Tahun 2003-2016

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, tren selaras antara penyaluran pembiayaan rahn dan jumlah nasabah yang terus meningkat dari tahun 2003 hingga tahun 2011 sebesar 7.822.599 miliar rupiah dan 2.345.814 orang. Pada tahun 2012 hingga tahun 2014 tren penyaluran pembiayaan rahn meningkat tidak signifikan sebesar 11.722.736 miliar rupiah sedangkan jumlah nasabah pada tahun 2014 menurun tajam mencapai 577.273 orang. Tahun berikutnya hingga tahun 2016 tren penyaluran pembiayaan rahn dan jumlah nasabah kembali meningkat dengan masing-masing pencapain 14.096.938 miliar rupiah dan 854.182 orang.

Secara umum total pembiayaan rahn yang disalurkan pegadaian syariah dari tahun 2003 sampai tahun 2016 mencapai rata-rata 5.729.464.857 triliun rupiah dan jumlah nasabah mencapai

rata-rata 951.952 orang. Pembiayaan rahn yang terus meningkat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kesadaran masyarakat terhadap hadirnya pegadaian yang telah membantu masyarakat dalam mengatasi masalah, pembiayaan rahn merupakan produk pertama pada Pegadaian Syariah di Indonesia, dan masa pencairan dana yang cepat juga mendorong pembiayaan rahn terus meningkat. Perkembangan pembiayaan rahn di Pegadaian juga didorong beberapa program promosi yang terintegrasi dengan program promosi bisnis gadai konvensional, seperti kemilau emas pegadaian, tebar hadiah ramadhan, ketupat lebaran pegadaian dan program promosi kado akhir tahun.

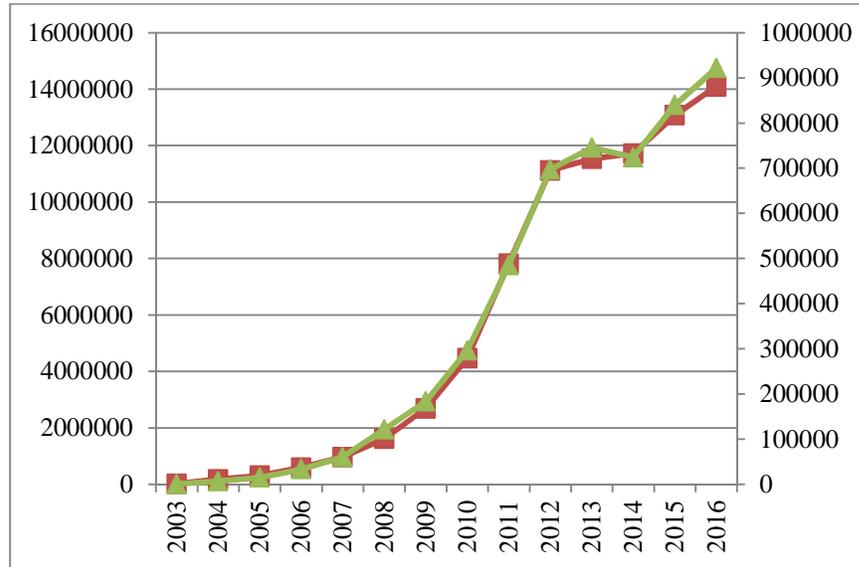
Pada tahun 2014 perusahaan telah menerapkan sistem online diseluruh Indonesia sehingga data nasabah yang sebelumnya dihitung dari jumlah akun (*account number*) saat ini menggunakan sistem *single account* hal ini berakibat pada perubahan data jumlah nasabah. Dalam meningkatkan pembiayaan rahn selain yang telah di sebutkan diatas upaya yang dilakukan oleh PT Pegadaian Indonesia (Persero) juga menerapkan program *referral* guna meningkatkan jumlah nasabah yang di mulai sejak pertengahan November 2014 dan efektif di tahun 2015. Sehingga, jumlah nasabah mencapai 823.980 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

4.2.2 Pembiayaan Rahn dan Pendapatan Sewa Modal

Pendapatan sewa modal adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha penyaluran uang pinjaman. Pendapatan sewa modal diperoleh dari

pengenaan tarif sewa modal sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan (Sinarti, 2012).

Ada keterkaitan antara pembiayaan rahn dengan pendapatan sewa modal ditampilkan pada gambar 4. 2 dibawah ini:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar: 4.2 Pembiayaan Rahn (Miliar Rupiah) dan Pendapatan Sewa Modal (Miliar Rupiah) Pegadaian Syariah Indonesia Tahun 2003-2016

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, tren penyaluran pembiayaan rahn dan pendapatan sewa modal yang diperoleh pegadaian syariah dari tahun 2003 sampai tahun 2012 masing-masing mencapai 11.122.405 miliar rupiah dan 697.401 miliar rupiah. Pada tahun 2013 hingga tahun 2014 tren penyaluran pembiayaan rahn meningkat tidak signifikan sedangkan pendapatan sewa modal menurun sebesar 724240 miliar rupiah. Berikutnya dari tahun 2015

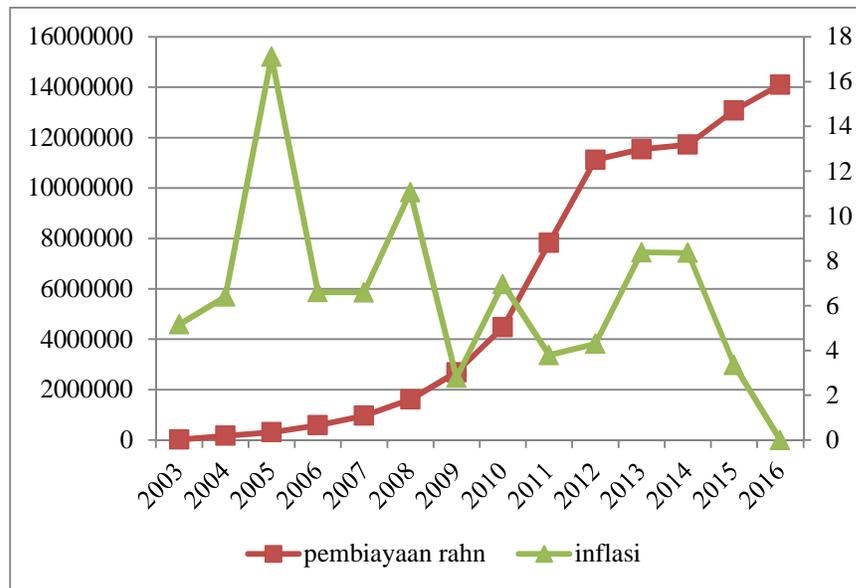
hingga 2016 tren penyaluran pembiayaan rahn dan pendapatan sewa modal meningkat dengan pencapaian pendapatan sewa modal sebesar 921.769 miliar rupiah. Secara umum pendapatan sewa modal yang diperoleh pegadaian syariah Indonesia dari tahun 2003-2016 mencapai rata-rata 366.513,9286 miliar rupiah.

Pada tahun 2014 tantangan yang dihadapi Pegadaian dalam menjalankan usaha dan tanggung jawabnya sangat berat. Ditengah kondisi perekonomian yang sulit pegadaian menyalurkan pembiayaan rahn sebesar 11.722.736 miliar rupiah dan pendapatan sewa modal sebesar 724.240 miliar rupiah pendapatan ini lebih kecil dibandingkan dengan periode tahun 2013. Pencapaian pendapatan sewa modal yang menurun ini terutama disebabkan adanya penurunan harga emas yang terjadi selama tahun 2013-2014, sehingga mempengaruhi *loan to value* (LTV) dan nilai taksiran agunan pembiayaan rahn yang merupakan portofolio aset produktif terbesar.

4.2.3 Penyaluran Pembiayaan Rahn dan Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/ komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu (Karim, 2017).

Ada keterkaitan antara pembiayaan rahn dengan tingkat inflasi ditampilkan pada gambar 4.3 dibawah ini:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar: 4.3 Pembiayaan Rahn (Miliar Rupiah) dan Tingkat Inflasi Pegadaian Syariah Indonesia Tahun 2003-2016

Berdasarkan gambar 4.3 diatas tren penyaluran pembiayaan dan tingkat inflasi dari tahun 2003 hingga tahun 2016 tidak selaras, pembiayaan rahn terus meningkat sedangkan inflasi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 hingga tahun 2014 pembiayaan rahn dan inflasi meningkat dengan masing-masing pencapaian sebesar 11.722.736 miliar rupiah dan 8,36 persen. Kemudian pada tahun 2015-2016 pembiayaan rahn meningkat sebesar 1.4096.938 miliar rupiah sedangkan inflasi turun menacapai titik terendah sebesar 3,02 persen. Secara keseluruhan inflasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata 6,98 persen dari tahun 2003-2016.

Pada tahun 2005 inflasi mencapai 17,11 persen. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) Perubahan IHK pada tahun 2005 disebabkan oleh *administered price* seperti naiknya harga minyak. Pada tahun tersebut harga minyak dunia naik dan menyebabkan kenaikan pada harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Di samping dampak langsung dari inflasi, pemerintah menyesuaikan tarif angkutan umum sesuai dengan kenaikan BBM hal ini memberikan dampak lanjutan pada kenaikan tarif angkutan sehingga menjadikan harga barang dan jasa melambung.

Pada tahun 2008 krisis moneter kembali terjadi yang mengakibatkan inflasi naik menjadi 11,06 persen. Penyebab inflasi pada tahun ini adalah krisis utang di Eropa dan geopolitik di Timur Tengah termasuk diantaranya adalah masalah embargo Iran sehingga negara tersebut menghentikan ekspor minyak ke negara Uni Eropa dan Amerika oleh karena itu harga minyak naik. Meningkatnya harga minyak dunia mengharuskan pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM. Selain itu meningkatnya harga komoditas pangan dunia otomatis akan meningkatkan biaya pokok produksi barang. Setelah itu inflasi terus fluktuasi hingga pada tahun 2014 inflasi mencapai 3,36 persen. Pegadaian syariah tetap mampu menyalurkan pembiayaan rahn yang terus meningkat meskipun ditengah kondisi ekonomi dunia dan ekonomi domestik yang belum membaik.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah nasabah, pendapatan sewa modal, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Data yang digunakan rentang waktu analisis mulai tahun 2003-2016. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak spss versi 20 dengan metode analisis *Ordinary Least Square* (OLS). Maka oleh karena itu perlu dilihat perkembangan secara umum dari jumlah nasabah, pendapatan sewa modal, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai apakah nilai residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki nilai residual terdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai *Asymp. Sig.* pada hasil uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Ketentuan suatu model regresi berdistribusi secara normal apabila *probability* dari *Kolmogrov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,464
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,983

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel 4.1 di atas diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,983. Karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan ada korelasi antar variabel bebas. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai VIF > 10 maka model regresi menolak H_0 . Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari multikolinearitas. Hasil perhitungan data diperoleh nilai VIF sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	VIF	Keterangan
Jumlah nasabah	1,544	Tidak terjadi multikolonieritas
Pendapatan sewa modal	1,568	Tidak terjadi multikolonieritas
Tingkat inflasi	1,040	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa semua nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak menolak H_0 sehingga tidak terjadi gejala multikolonieritas yaitu korelasi antar variabel bebas.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu $t-1$. Untuk menguji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,829

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,829 dan angka D-W berada di antara $du < d < 4-du$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada atau tidak terjadi *autokorelasi* dalam penelitian ini.

4.3.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi penelitian yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Jumlah nasabah	0,587	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pendapatan sewa modal	0,085	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat inflasi	0,291	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi variabel jumlah nasabah (X_1), pendapatan sewa modal (X_2), dan tingkat inflasi (X_3) $> 0,05$ sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.4 Uji Koefisien Regresi Linier Berganda

Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas jumlah nasabah (X_1), pendapatan sewa modal (X_2), dan tingkat inflasi (X_3) terhadap variabel terikat yaitu penyaluran pembiayaan Rahn (Y) pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2003-2016. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	B
(Constant)	2419,976
x1	,027
x2	15,603
x3	-31,167

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = 2419,976 + 0,027 X_1 + 15,603 X_2 - 31,167 X_3 + \epsilon$$

Koefesien regresi variabel jumlah nasabah (X_1) bernilai positif sebesar 0,027. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan jumlah nasabah satu orang maka jumlah pembiayaan akan meningkat sebesar 0,027 miliar rupiah. Kenaikan jumlah nasabah akan mengakibatkan kenaikan jumlah pembiayaan rahn. Koefesien regresi variabel pendapatan sewa modal (X_2) bernilai positif sebesar 15,603. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan pendapatan sewa modal satu miliar rupiah maka jumlah pembiayaan akan meningkat sebesar 15,603 miliar rupiah. Kenaikan pendapatan sewa modal akan mengakibatkan kenaikan jumlah pembiayaan rahn. Koefesien regresi variabel tingkat inflasi (X_3) bernilai negatif sebesar -31,167. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% tingkat inflasi maka jumlah pembiayaan akan menurun sebesar 31,167 miliar rupiah. Kenaikan tingkat inflasi akan mengakibatkan penurunan jumlah pembiayaan rahn.

4.5 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	Signifikan	Kesimpulan
Jumlah nasabah	0,295	0,774	Jumlah nasabah tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016
Pendapatan sewa modal	68,882	0,000	Pendapatan sewa modal berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016
Tingkat inflasi	-0,284	0,829	Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6 diatas diketahui bahwa pada variabel jumlah nasabah t_{hitung} diperoleh 0,295 dan probabilitas sebesar 0,774. Jika digunakan nilai $\alpha = 0,05$ maka tidak ada pengaruh probabilitas jumlah nasabah terhadap

penyaluran pembiayaan rahn. Artinya jumlah nasabah tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016. Penyaluran pembiayaan rahn terus mengalami peningkatan setiap tahun meskipun jumlah nasabah fluktuasi. Variabel pendapatan sewa modal diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 68,882 dan probabilitas sebesar 0,000. Jika digunakan nilai $\alpha = 0,05$ maka ada hubungan probabilitas pendapatan sewa modal. Artinya pendapatan sewa modal berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016. Semakin besar pendapatan sewa modal yang diperoleh maka akan semakin besar pembiayaan rahn yang dapat disalurkan oleh Pegadaian Syariah terhadap masyarakat.

Variabel tingkat inflasi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,284 dan probabilitas sebesar 0,829. Jika digunakan nilai $\alpha = 0,05$ maka tidak ada hubungan probabilitas tingkat inflasi. Artinya, tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016. Ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang kurang baik menyebabkan harga-harga barang naik. Hal ini tidak menjadikan suatu alasan bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan pembiayaan rahn pada Pegadaian syariah sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi masyarakat lebih condong menggunakan pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah diwaktu

mendesak. Oleh karena itu penyaluran pembiayaan rahn tetap meningkat kendatipun inflasi berada di titik terendah.

4.6 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan
ANOVA^a

Model	F	Sig.
Regression	2494,944	,000 ^b

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji ketepatan model (uji F) pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung pada tabel ANOVA yaitu sebesar 2494,944 dan sig. 0,000 dibandingkan dengan alpha ($\alpha = 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel jumlah nasabah (X_1), pendapatan sewa modal (X_2), dan tingkat inflasi (X_3) secara bersama-sama atau simultan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2003-2016. Artinya secara bersama jumlah nasabah (X_1), pendapatan sewa modal (X_2), dan tingkat inflasi (X_3) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn (Y). Hal ini harus dilihat dari segi bahwa jumlah

nasabah, pendapatan sewa modal, dan tingkat inflasi harus menjadi satu kesatuan dalam mempengaruhi pembiayaan rahn.

4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan seberapa besar proporsi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Hasil perhitungan untuk nilai *R Square* (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	Adjusted R Square
1	,998

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan untuk nilai *R Square* (R^2) diperoleh angka sebesar 0,998. Hal ini berarti jumlah nasabah (X_1), pendapatan sewa modal (X_2) dan tingkat inflasi (X_3) mampu menjelaskan keragaman pembiayaan rahn (Y) sebesar 99,8% sedangkan sisanya ($100\% - 99,8\% = 0,2\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.8.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan variabel jumlah nasabah, pendapatan sewa modal dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan rahn. Selain hasil uji

simultan, terdapat pula hasil uji koefisien determinasi dimana koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R²*) menunjukkan angka 99,8%. Interpretasinya adalah variabel pembiayaan rahn dipengaruhi oleh variabel jumlah nasabah, pendapatan sewa modal dan tingkat inflasi sebesar 99,8% dan sisanya 0,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini terjadi karena pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia dari tahun 2003-2016 di pengaruhi oleh faktor internal perusahaan. Oleh karena itu dalam meningkatkan kinerja penyaluran pembiayaan rahn agar menjadi produk yang unggul pada Pegadaian upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pelayanan kepada nasabah, mengoptimalkan teknologi, dan memperluas jaringan operasional pelayanan.

4.8.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2

a. Pengaruh Jumlah Nasabah Terhadap Pembiayaan Rahn

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial jumlah nasabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan rahn. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Purnomo (2009) menyatakan bahwa jumlah nasabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika. Penelitian Widiarti dan Sunarti (2013) menyatakan bahwa jumlah nasabah mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Cabang Batam. Begitu juga yang ditunjukkan oleh

penelitian Aziz (2013) menyatakan bahwa jumlah nasabah mempengaruhi jumlah penyaluran kredit di PT. Pegadaian Cabang Probolinggo.

b. Pengaruh Pendapatan Sewa Modal Terhadap Pembiayaan Rahn

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial pendapatan sewa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan rahn. Pengaruh positif antara pendapatan sewa modal dan pembiayaan rahn menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan sewa modal akan meningkatkan penyaluran pembiayaan rahn begitu juga sebaliknya setiap penurunan pendapatan sewa modal akan menurunkan penyaluran pembiayaan rahn karena pendapatan sewa modal merupakan salah satu faktor internal yang mendukung pembiayaan rahn meningkat dalam PT Pegadaian (Persero) Indonesia.

Sumber dana yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan gadai konvensional dan rahn berasal dari dua sisi yaitu eksternal seperti investor, perbankan dan lainnya. Selanjutnya dari sisi internal berupa dana yang disalurkan untuk pembiayaan rahn berasal dari pendapatan usaha yang diperoleh dari biaya administrasi dan biaya sewa modal. Oleh karena itu, hasil variabel pendapatan sewa modal signifikan, berarti penyaluran pembiayaan rahn dipengaruhi oleh pendapatan sewa modal. Meningkatnya pendapatan sewa modal ini dapat diartikan bahwa penyaluran

pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah masih berjalan dengan baik dan terus menunjukkan peningkatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Purnomo (2009), Widiarti dan Sunarti (2013), menyatakan bahwa secara parsial variabel pendapatan sewa modal berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Hasil penelitian ini berbeda ditunjukkan oleh penelitian Aziz (2013) menyatakan bahwa tingkat sewa modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit gadai golongan C.

c. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Rahn

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel inflasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn, yang berarti setiap kenaikan inflasi akan menurunkan penyaluran pembiayaan rahn begitu juga sebaliknya setiap penurunan inflasi akan meningkatkan penyaluran pembiayaan rahn karena inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang menjadi faktor eksternal dalam penyaluran pembiayaan pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia. Hasil variabel inflasi tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn, berarti penyaluran pembiayaan rahn tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi.

Kenaikan harga barang dan jasa maka mengakibatkan nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia

usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. Dalam Pegadaian inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakat untuk menggunakan pembiayaan rahn sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun harga barang naik secara umum dan terus-menerus masyarakat masih dapat menggunakan alternatif lain dalam pemenuhan kebutuhan.

Menurut penelitian Ade Purnomo (2009) bahwa variabel inflasi secara statistik positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika. Hal ini lebih menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi di DKI Jakarta tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan usaha penyaluran kredit perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika. Begitu pula dengan penelitian Febrian (2015) bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh jumlah nasabah, pendapatan sewa modal dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada pengaruh variabel jumlah nasabah (X_1) terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016 dengan nilai signifikan sebesar 0,774 pada taraf $\alpha = 0,05$ (5%).
2. Ada pengaruh variabel pendapatan sewa modal terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 pada taraf $\alpha = 0,05$ (5%).
3. Tidak ada pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016 dengan nilai signifikan sebesar 0,829 pada taraf $\alpha = 0,05$ (5%).
4. Secara bersama-sama variabel jumlah nasabah (X_1), pendapatan sewa modal (X_2), dan tingkat inflasi (X_3) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn pada PT

Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016 dengan nilai signifikan 0,000 pada taraf nyata $= 0,05$ (5%).

5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peyaluran pembiayaan rahn oleh PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016 dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pendapatan sewa modal. Maka diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kinerja penyaluran pembiayaan rahn.

- a. Pegadaian harus mampu beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, artinya pegadaian harus mampu menciptakan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.
 - b. Sesuai dengan *tag line* pegadaian yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah maka pegadaian perlu menjaga kestabilan dan meningkatkan kembali peran pegadaian untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.
 - c. Pegadaian juga perlu memperhatikan keadaan ekonomi makro seperti tingkat inflasi, harga emas dan tingkat suku agar kestabilan kondisi pegadaian tetap terjaga dan terus mampu menyalurkan pembiayaan rahn.
- ### 2. Bagi penelitian selanjutnya
- a. Variabel bebas yang positif merupakan yang sangat penting dalam penyaluran pembiayaan rahn, harapannya

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan melihat juga pada variabel-variabel bebas lainnya.

- b. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada lembaga keuangan non-bank lainnya serta menggunakan variabel-variabel lain sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum mengenai penyaluran pembiayaan rahn.
3. Bagi pihak lain
 - a. Produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, namun masih kalah banyak dengan produk konvensional sedangkan penganut muslim adalah penduduk mayoritas di Indonesia. Harapannya masyarakat dapat menggunakan produk pegadaian syariah yang terhindar dari riba.
 - b. Pemerintah harus lebih peka terhadap hadirnya pegadaian syariah juga lembaga keuangan bank dan non-bank lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ardiyanto, R. D. (2015). Pengaruh Tingkat Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Equilibrium* , 66.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Jasa Grafindo Persada.
- Aziz, M. A. (2013). Analisis pengaruh tingkat sewa modal, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit gadai golongan C (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang* .
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darsono. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Febrian, D. (2015). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit Rahn pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013). *Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* .
- Gujarati, D. N. (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.

- Heykal, N. H. (2013). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>. 2017. Data Inflasi Tahunan, diakses pada tanggal 3 November 2017. Jam 15.40 WIB.
- <https://www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-tahunan>. 2017. Laporan Keuangan Tahunan, diakses pada tanggal 5 November 2017. Jam 09.45
- Huda, N. (2013). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Ciputat: Ciputat Press Grup.
- Husna, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan Di Bawah 40%. *Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam* .
- Janie, D. N. (2012). *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang : Semarang University Press.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, M. F. (2014). *Esai-Esai Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lungan, R. (2006). *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta. Ekonisia.

- Muslich, W. A. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- N. Gregory Mankiw, E. Q. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pegadaian, P. (2016). *Annual Report*. Jakarta: PT Pegadaian.
- Purnomo, A. (2009). Pengaruh pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika periode 2004-2008. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- Purwanto, S. d. (2015). *Statistik untuk Ekonomi dan keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rodoni, A. (2015). *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sinarti, d. (2013). Pengaruh pendapatan, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Cabang Batam Periode 2008-2012. *Jurnal Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam* .
- Sri Rahayu, D. I. (2013). Analisis pengaruh pendapatan, harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit (studi kasus pada Perum Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Periode Maret 2009 – September 2011). *Jurnal Akuntansi*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suseno, A. S. (2009). *Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Suwarjeni, V. W. (2015). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Swiknyo, D. (2009). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Walpole, R. E. (1995). *Pengantar Statistika Edisi ke-3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Yenni. (2017). Analisis pengaruh tingkat inflasi dan pendapatan pegadaian terhadap penyaluran kredit rahn (studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia). *Jurnal Menara Ekonomi FE Universitas Budi Luhur* , 3.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**Tabel Laporan Keuangan Tahunan PT Pegadaian (Persero)
di Indonesia Tahun 2003-2016**

Tahun	Pembiayaan Rahn	Nasabah	Pendapatan Sewa Modal	Inflasi
2003	19.891	13.526	405	5,16
2004	174.595	121.379	6.815	6,4
2005	308.709	226.424	15.031	17,11
2006	591.087	312.577	33.363	6,6
2007	964.056	446.984	60.467	6,59
2008	1.613.520	570.342	121.212	11,06
2009	2.689.541	819.830	183.447	2,78
2010	4.473.135	1.286.829	296.571	6,96
2011	7.822.599	2.345.814	484.758	3,79
2012	11.122.405	2.292.312	697.401	4,3
2013	11.535.454	2.635.871	745.679	8,38
2014	11.722.736	577.273	724.240	8,36
2015	13.077.842	823.980	840.037	3,35
2016	14.096.938	854.182	921.769	3,02

Lampiran 2

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		14
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	201810,67079051
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,124
	Positive	,124
	Negative	-,124
	Kolmogorov-Smirnov Z	,464
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,983

Test distribution is Normal.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2419,976	135250,431		,018	,986		
nasabah	,027	,091	,004	,295	,774	,648	1,544
pendapatan	15,603	,227	,996	68,882	,000	,638	1,568
Inflasi	-31,167	140,379	-,003	-,222	,829	,962	1,040

a. Dependent Variable: pembiayaan

Lampiran 3

3. Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,999 ^a	,999	,998	230099,567	1,829

- a. Predictors: (Constant), nasabah, pendapatan sewa modal, inflasi
 b. Dependent Variable: pembiayaan rahn

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	56300,917	63374,159		,888	,395
nasabah	-,014	,043	-,102	-,318	,757
pendapatan	,203	,106	,616	1,914	,085
inflasi	73,387	65,777	,292	1,116	,291

- a. Dependent Variable: Res2

Lampiran 4

5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2419,976	135250,431		,018	,986
Nasabah	,027	,091	,004	,295	,774
pendapatan	15,603	,227	,996	68,882	,000
Inflasi	-31,167	140,379	-,003	-,222	,829

Dependent Variable: pembiayaan

Lampiran 5

6. Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3962905773997 69,940	3	1320968591332 56,640	2494,944	,000 ^b
Residual	529458108983,8 43	10	52945810898,38 4		
Total	3968200355087 53,750	13			

- Dependent Variable: pembiayaan
- Predictors: (Constant), nasabah, pendapatan sewa modal, inflasi

7. Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,999 ^a	,999	,998	230099,567

- Predictors: (Constant), nasabah, pendapatan sewa modal, inflasi
- Dependent Variable: pembiayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ardiyanto, R. D. (2015). Pengaruh Tingkat Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Equilibrium* , 66.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Jasa Grafindo Persada.
- Aziz, M. A. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang* .
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darsono. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Febrian, D. (2015). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit Rahn pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013). *Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* .
- Gujarati, D. N. (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.

- Heykal, N. H. (2013). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>. 2017. Data Inflasi Tahunan, diakses pada tanggal 3 November 2017. Jam 15.40 WIB.
- <https://www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-tahunan>. 2017. Laporan Keuangan Tahunan, diakses pada tanggal 5 November 2017. Jam 09.45
- Huda, N. (2013). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Ciputat: Ciputat Press Grup.
- Husna, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan Di Bawah 40%. *Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam* .
- Janie, D. N. (2012). *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang : Semarang University Press.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, M. F. (2014). *Esai-Esai Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lungan, R. (2006). *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta. Ekonisia.

- Muslich, W. A. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- N. Gregory Mankiw, E. Q. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pegadaian, P. (2016). *Annual Report*. Jakarta: PT Pegadaian.
- Purnomo, A. (2009). Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Periode 2004-2008. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- Purwanto, S. d. (2015). *Statistik untuk Ekonomi dan keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rodoni, A. (2015). *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sinarti, d. (2013). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit pada Perum Pegadaian Cabang Batam Periode 2008-2012. *Jurnal Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam* .
- Sri Rahayu, D. I. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada Perum Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Periode Maret 2009 – September 2011). *Jurnal Akuntansi*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suseno, A. S. (2009). *Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Suwarjeni, V. W. (2015). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Swiknyo, D. (2009). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Walpole, R. E. (1995). *Pengantar Statistika Edisi ke-3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Yenni. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pendapatan Pegadaian terhadap Penyaluran Kredit Rahn (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Di Indonesia). *Jurnal Menara Ekonomi FE Universitas Budi Luhur* , 3.

Lampiran 1

**Tabel Laporan Keuangan Tahunan PT Pegadaian (Persero)
di Indonesia Tahun 2003-2016**

Tahun	Pembiayaan Rahn	Nasabah	Pendapatan Sewa Modal	Inflasi
2003	19.891	13.526	405	5,16
2004	174.595	121.379	6.815	6,4
2005	308.709	226.424	15.031	17,11
2006	591.087	312.577	33.363	6,6
2007	964.056	446.984	60.467	6,59
2008	1.613.520	570.342	121.212	11,06
2009	2.689.541	819.830	183.447	2,78
2010	4.473.135	1.286.829	296.571	6,96
2011	7.822.599	2.345.814	484.758	3,79
2012	11.122.405	2.292.312	697.401	4,3
2013	11.535.454	2.635.871	745.679	8,38
2014	11.722.736	577.273	724.240	8,36
2015	13.077.842	823.980	840.037	3,35
2016	14.096.938	854.182	921.769	3,02

Lampiran 2

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		14
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	201810,67079051
	Absolute Most Extreme Differences	,124
	Positive	,124
	Negative	-,124
	Kolmogorov-Smirnov Z	,464
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,983

Test distribution is Normal.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2419,976	135250,431		,018	,986		
nasabah	,027	,091	,004	,295	,774	,648	1,544
pendapatan	15,603	,227	,996	68,882	,000	,638	1,568
Inflasi	-31,167	140,379	-,003	-,222	,829	,962	1,040

a. Dependent Variable: pembiayaan

Lampiran 3

3. Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,999 ^a	,999	,998	230099,567	1,829

a. Predictors: (Constant), nasabah, pendapatan sewa modal, inflasi

b. Dependent Variable: pembiayaan rahn

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	56300,917	63374,159		,888	,395
nasabah	-,014	,043	-,102	-,318	,757
pendapatan	,203	,106	,616	1,914	,085
inflasi	73,387	65,777	,292	1,116	,291

a. Dependent Variable: Res2

Lampiran 4

5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2419,976	135250,431		,018	,986
Nasabah	,027	,091	,004	,295	,774
pendapatan	15,603	,227	,996	68,882	,000
Inflasi	-31,167	140,379	-,003	-,222	,829

Dependent Variable: pembiayaan

Lampiran 5

6. Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3962905773 99769,940	3	13209685913 3256,640	2494,94 4	,000 ^b
Residual	5294581089 83,843	10	52945810898 ,384		
Total	3968200355 08753,750	13			

a. Dependent Variable: pembiayaan

b. Predictors: (Constant), nasabah, pendapatan sewa modal, inflasi

7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,999 ^a	,999	,998	230099,567

a. Predictors: (Constant), nasabah, pendapatan sewa modal, inflasi

b. Dependent Variable: pembiayaan



BIODATA

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Sa'adatul Hijriah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Manyang, 22 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Ajun, Aceh Besar
7. Email : Saadatul22z@gmail.com
8. Warga Negara : Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Dasar/MI : MIN 1 Glumpang Minyeuk
2. Pendidikan SMP/MTs : MTsN Beureunuen
3. Pendidikan SMA/MA : MAS Ummul Ayman Samalanga

C. Orang Tua

1. Nama Ayah : Syammaun Husen (Alm)
3. Nama Ibu : Burhanah
4. Pekerjaan Ibu : PNS

D . Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Pendidikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF) Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Periode 2015-2016.
2. Anggota Divisi Pendidikan dan Pengajaran di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Periode 2016-2017.
3. Anggota Divisi Kesejahteraan Ekonomi Mahasiswa di Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry Periode 2016-2017.
4. Anggota Departemen Quran pada Quran Aplikasi Forum (QAF) UIN Ar-Raniry Periode 2016-sekarang.
5. Anggota Divisi Akademik dan Potensi (AKSI) Almahira *Islamic Economics Community* (IEC) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Periode 2017-sekarang.
6. Anggota Divisi Pendidikan di Generasi Baru Indonesia (GenBI) Aceh Periode 2017-sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup saya buat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam, 10 Juli 2018

Penulis,



Sa'adatul Hijriah